

EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN SURABAYA GOVERNMENT OFFICES

Dhonny Rizkiyan Perdana

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

ABSTRACT

Government Resources Management System program is a system of Surabaya City Government that can integrate the management of government resources from upstream to downstream activities in order to support the financial management. But there is still a problem in its application, such as, issues of data transparency winning bidder and the data presented in the website is not updated. The purpose of this study is to assess the effectiveness of the implementation of Government Resources Management System in Surabaya City Government offices.

This type of study used descriptive quantitative approach. Population and sample are all Civil Servants who is based in Surabaya City Government office with the sampling method Proportional Stratified Random Sampling with a sample of 60 peoples consist of a staff position of 29 peoples followed by the Administration, Chief, Division of Head and Head of Departement. For data collection techniques, the author used a questionnaire. In this study, author uses theory of the implementation of e-Government by Darcy with variables Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholder, Transparency/Visibility, Budget, Technology and Innovation.

The results showed the effectiveness of the implementation of Government Resources Management System programs obtain the value of 3,95 which is in the interval 3,41–4,2 in the effective category. While the percentage of effectiveness of the implementation of Government Resources Management System programs in Surabaya City Government reached 79%. However based on the results of the study, there are several shortcomings such as the Political Environment indicator, which its lack of overall socialization and no internal sponsorship. Leadership indicator show that political climate is not too influential to the implementation of this program. Further the indicator of Technology/Visibility also have a problem such as public hasn't received much information. Then in the Budget indicator found that no sponsorship from the other parties in the implementation of this program.

Advice can be given are: 1) improve the socialization of Surabaya City Government wishes to establish Government Resources Management System to the public 2) The stakeholders should continue to support the implementation of Government Resources Management System programs 3) Disclosure of information/data about the entire program of Government Resources Management System to the public 4) received help from outsiders.

Keywords: Effectiveness of the Program, e-Government, Government Resources Management System

EFEKTIVITAS PENERAPAN GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM DI KANTOR PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Dhonny Rizkiyan Perdana

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

ABSTRAK

Program Government Resources Management System merupakan sebuah sistem dari Pemerintah Kota Surabaya yang dapat mengintegrasikan pengelolaan sumber daya pemerintahan dari aktifitas hulu sampai hilir dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah. Namun masih terdapat masalah dalam penerapannya, antara lain masalah transparansi data pemenang tender dan data yang disajikan dalam website tidak update. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan program Government Resources Management System di kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di lingkungan kantor Pemerintah Kota Surabaya dengan metode pengambilan sampel Proportional Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel 60 orang yang terdiri dari staf sebanyak 29 orang diikuti oleh Tata Usaha, Kepala Sie, Kepala Subbagian dan Kepala Bagian. Untuk teknik pengumpulan data, penulis menggunakan kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori efektivitas penerapan e-Government oleh Darcy dengan variabel Political Environment, Leadership, Planning, Stakeholder, Transparency/Visibility, Budget, Technology dan Innovation.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerapan program Government Resources Management System memperoleh nilai 3,95 yang berada pada interval 3,41–4,2 masuk kategori efektif. Sementara prosentase efektivitas penerapan program Government Resources Management System di kantor Pemerintah Kota Surabaya mencapai 79%. Namun berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kekurangan seperti pada indikator Political Environment, yaitu belum menyeluruhnya sosialisasi dan tidak adanya sponsor internal. Indikator Leadership menunjukkan bahwa iklim politik yang tidak terlalu berpengaruh terhadap penerapan program ini. Selanjutnya indikator Transparency/Visibility juga terdapat masalah yaitu belum banyaknya informasi yang diterima masyarakat. Kemudian dalam indikator Budget ditemukan bahwa tidak adanya sponsor dari pihak lain dalam penerapan program ini.

Saran yang dapat diberikan diberikan yaitu: 1) meningkatkan sosialisasi tentang keinginan Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun Government Resources Management System kepada masyarakat 2) Pihak stakeholder harus terus mendukung penerapan program Government Resources Management System 3) Keterbukaan informasi/data tentang seluruh program Government Resources Management System kepada masyarakat 4) menerima bantuan dari pihak luar

Kata Kunci: Efektivitas Program, e-Government, Government Resources Management System

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat secara efektif, efisien, mudah, hemat biaya, transparan dan bertanggung jawab. Namun kenyataannya Pemerintah seringkali mengalami masalah dalam memberikan pelayanan dengan adanya prosedur yang berbelit-belit dan pungutan-pungutan liar yang masih ada hingga sekarang. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Industri Perdagangan dan Logistik, Natsir Mansyur, sebagai berikut:

"Pungli ini bagian daripada dinamika bisnis, tapi pungli itu tidak seberapa banyak kalau dibandingkan dengan birokrasi yang berbelit-belit. Hitungan kerugian dari pungli hanya terbatas pada kerugian materi saja, sedangkan birokrasi dan perizinan mencakup kerugian materi dan akan banyak waktu yang terbuang."
(<http://www.analisadaily.com>, 26 Desember 2012)

Masyarakat pun seringkali disulitkan karena harus pergi ke kantor pemerintahan terlebih dahulu untuk memperoleh pelayanan, mengantri panjang yang membuang-buang waktu dan membayar mahal untuk sebuah layanan yang seharusnya mudah dan transparan. Seperti yang diungkapkan Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono, bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi SKPD di lingkungan Pemkot Surabaya, diantaranya masalah lambannya pengurusan izin yang kerap dikeluhkan warga. Pak Bambang DH juga menyatakan bahwa kenapa harus

lama pengurusannya jika memang transparan dan data tidak fiktif (www.lensaindonesia.com, 7 Desember 2012). Hal ini tentunya membuka peluang terjadi tindak korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan.

Tidak hanya masyarakat kalangan bawah yang dipersulit dalam memperoleh pelayanan, kalangan bisnis juga direpotkan dalam mengurus segala macam perizinan dan pembayaran atas usahanya kepada pihak pemerintah yang seharusnya mudah didapatkan. Padahal sudah tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan demi mempermudah akses masyarakat. Oleh karena itu, di era yang serba modern ini, pemerintah menggunakan segala sumber daya termasuk teknologi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan penerapan *e-Government*.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Tujuan utama penerapan prinsip GCG adalah mencapai optimalisasi kinerja para karyawan yang intinya akan meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, kepentingan manajemen dan karyawan harus mendapat perlakuan yang seimbang dan wajar sesuai dengan kedudukan masing-masing. Pelaksanaan GCG menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan GCG menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat

dalam perusahaan termasuk masyarakat.

Kemudahan hubungan tata-pemerintahan melalui *e-Government* direspon dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya demi memperbaiki layanan kepada pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk memperbaiki layanannya, Pemerintah Kota Surabaya mengadopsi ERP (*Enterprise Resource Planning*), salah satu *software* yang diminati perusahaan di Indonesia saat ini (<http://software.infogate.com>, diakses 23 Februari 2013). ERP merupakan *software* yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi atau keuangan. Tujuan dari sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan (<http://en.wikipedia.org>, diakses 23 Februari 2013). Adapun manfaat yang utama dari sistem ERP ini adalah menawarkan sistem terintegrasi di dalam perusahaan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien (Yoedha, 2011).

Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan *software* ERP ini menjadi sebuah program yang bernama *Government Resources Management System* (GRMS). GRMS didefinisikan sebagai sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktifitas birokrasi hulu sampai hilir (dalam konteks belanja) yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah (dokumen Bina Program Pemkot Surabaya, 2010).

Government Resources Management System sendiri memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan diterapkannya GRMS, pengadaan barang yang dilakukan pemerintah dapat diketahui sebenar-benarnya tanpa ada *mark-up* data dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, memudahkan informasi atas keadaan atau kondisi perkembangan pelaksanaan fisik pekerjaan dan permasalahannya. Ketiga, memudahkan mengetahui akumulasi pengeluaran biaya untuk setiap kegiatan yang dalam pengerjaan dan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah dilaksanakan (dokumen Bina Program Pemkot Surabaya, 2010).

Penerapan GRMS pada akhirnya diharapkan akan mendukung dalam pelaksanaan *Good Corporate Government* yang dicanangkan Pemerintah Kota Surabaya. Namun pada kenyataannya, masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam prakteknya seperti masalah transparansi data pemenang tender. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pihak swasta yang tidak puas dengan hasil lelang proyek yang masih terjadi padahal sudah menggunakan *e-Procurement* (www.lensaIndonesia.com, diakses 13 Februari 2013). Selain itu, menurut Sudirjo, Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, penerapan *e-Controlling* yang merupakan salah satu bagian dari skenario *e-Government* di Pemkot Surabaya, dirasa masih belum maksimal. Menurut beliau, data *e-Controlling* belum bisa menjadi acuan untuk mengontrol pelaksanaan proyek di Kota Surabaya karena data yang

disajikan tidak *update* (www.lensaindonesia.com, diakses 27 Februari 2013). Maka dari itu peneliti ingin meneliti sejauh manakah efektivitas penerapan *Government Resource Management System* (GRMS) di kantor Pemerintah Kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan *Government Resources Management System* di kantor Pemerintah Kota Surabaya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan *Government Resources Management System* di kantor Pemerintah Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang efektivitas program *e-Government*. Manfaat praktis, bagi pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi Pemerintah Kota Surabaya demi meningkatkan efektivitas penerapan *Government Resources Management System* di kantor Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis karena dapat mengimplementasikan ilmu yang diperolehnya selama kuliah, serta penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk mengetahui efektivitas penerapan *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Kata efektif biasanya digunakan dalam kaitannya dengan manajemen, misalnya keefektifan pengelolaan, keefektifan organisasi dan kepemimpinan serta keefektifan program. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang bisa memberikan hasil yang memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Siagian (2001), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

B. Efektivitas Penerapan *Electronic Government*

Darcy dalam Indrajit (2002) mengungkapkan bahwa terdapat delapan elemen sukses yang harus dimiliki dalam mengembangkan konsep-konsep digital pada sektor publik melalui penerapan *e-Government*. Melalui delapan elemen sukses tersebut diharapkan penerapan *e-Government* dapat berjalan efektif. Selanjutnya, Darcy dalam Indrajit (2002) menjabarkan sebagai berikut:

a. Political Environment

Elemen pertama dan paling krusial dalam penerapan *e-Government* adalah *political environment*. *Political environment* adalah keadaan atau suasana politik di mana program *e-Government* tersebut diterapkan. Ada dua tipe proyek sehubungan dengan hal ini. Pertama adalah *Top-Down Project*, di mana eksistensi sebuah proyek ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif sebagai otoritas tertinggi pemerintah didukung oleh kalangan legislatif sebagai pemberi mandat. Sementara itu proyek kedua adalah *Bottom-Up Project* yang didasarkan pada inisiatif dari para birokrat yang berada di salah satu lembaga pemerintah atau departemen.

Sehingga dapat dikatakan bahwa yang diharapkan dalam efektivitas penerapan *e-Government* adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep-konsep *e-Government* secara serius dan mendukung inisiatif yang berhubungan dengan *e-Government*.

b. *Leadership*

Elemen kedua ini berhubungan dengan unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan kenyataan dalam penerapan *e-Government*. Untuk mencapai efektivitas, setidaknya ada tiga hal minimum yang dibutuhkan pemerintah, yaitu:

- 1) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan

berbagai inisiatif *e-Government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.

- 2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.
- 3) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan demi tercapainya efektivitas *e-Government*.

c. *Planning*

Planning atau perencanaan adalah sebuah proses. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahap inilah gambaran menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif *e-Government* diproyeksikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah perencanaan yang baik akan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan sebuah program, dalam hal ini yang ingin dicapai adalah efektivitas penerapan *e-Government*.

d. *Stakeholders*

Stakeholders adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan baik kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung terhadap penyelenggaraan program *e-Government* terkait. Pihak-pihak yang dianggap sebagai *stakeholder* utama dalam proyek *e-Government* adalah pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang bersama-sama dalam usaha penerapan *e-Government*.

e. *Transparency/Visibility*

Transparansi sebuah proyek *e-Government* sangat

erat kaitannya dengan keberadaan stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh *stakeholder*. Dimungkinkannya pihak-pihak yang berkepentingan mengakses data dan informasi terkait dengan proyek yang sedang berlangsung secara tidak langsung merupakan sarana pemasaran (marketing) yang cukup efektif, karena di sana terlihat keseriusan pemerintah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk rakyatnya melalui penerapan beragam proyek *e-Government*.

f. Budgets

Kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek *e-Government* merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek. Besarnya anggaran yang disediakan pemerintah sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek terkait.

g. Technology

Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan di dalam *e-Government* sangatlah lebar, dari yang paling sederhana dan murah sampai dengan yang paling canggih. Pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah proyek *e-Government* sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia.

Maksudnya, semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang dapat dipilih dan dipergunakan, yang cenderung akan meningkatkan probabilitas tercapainya efektivitas suatu program.

h. Innovation

Aspek inovasi dalam hal ini adalah sebuah aspek di mana terdapat ide-ide yang kreatif dari para pembuat program yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan koneksi penggunaan *website* bagi pengunjungnya. Inovasi dapat dilakukan dengan memperhatikan keleluasaan *search engine*, *video camera* maupun jejak pendapat secara *online* yang dilakukan pengguna terhadap *website* yang bersangkutan.

C. Government Resources Management System (GRMS)

GRMS dibangun oleh Pemkot Surabaya bekerjasama dengan ITS (Institut Teknologi Surabaya) dan sudah dipatenkan oleh Pemkot Surabaya pada Ditjen HAKI pada tahun 2007. *Government Resources Management System* terdiri dari 6 segmen, antara lain:

- a) *e-Budgeting* adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah
- b) *e-Project Planning* adalah sistem informasi yang memiliki fungsi untuk memudahkan proses perencanaan project/pekerjaan setelah anggaran dari suatu kegiatan

disetujui. Proses perencanaan tersebut meliputi penentuan pekerjaan dan atribut-atribut lain yang diperlukan untuk proses pemaketan, misalnya penentuan bentuk lelang ataukah penunjukan langsung. Sistem informasi perencanaan kegiatan merupakan bagian kelanjutan dari *e-Budgeting*, dan menjadi tahapan awal yang diperlukan untuk sistem *e-Procurement* dan *e-Delivery*.

- c) *e-Procurement* adalah sistem lelang sebuah proyek yang dilakukan melalui internet.
- d) *e-Delivery* adalah Sistem Pendukung Administrasi Kegiatan yang didalamnya termasuk program komputer berbasis web untuk memfasilitasi kebutuhan pembuatan kontrak pengadaan barang/jasa dan penyediaan dokumen-dokumen kelengkapan.
- e) *e-Controlling* adalah salah satu bagian dari skenario besar *e-Government* di Pemerintah Kota Surabaya, melalui konsep GRMS (*Government Resource Management System*). Sistem ini menjembatani antara perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang ada di *e-Project Planning* dengan hasil pekerjaan yang diinputkan melalui sistem *e-Delivery*

e-Performance adalah sistem informasi manajemen kinerja dalam rangka penilaian prestasi kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan sehingga bisa terwujud pembinaan pegawai berdasarkan prestasi kerja dan sistem karir kerja PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai

dengan Peraturan Walikota No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya No. 86 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Uang Kinerja pada Belanja Langsung kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif adalah untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu, yaitu untuk memberikan fakta mengenai efektivitas *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya tanpa mencari atau menerangkan saling hubungan atau hipotesis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Jalan Jimerto No. 25-27 Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan karena Pemerintah Kota Surabaya yang memiliki dan menerapkan program *Government Resources Management System*.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di lingkungan kantor Pemerintah Kota Surabaya Jalan Jimerto 25-27 Surabaya sebanyak 597 orang. Teknik pengambilan sampel total adalah menggunakan cara yang

dikemukakan oleh Arikunto (2006:134), yakni besarnya sampel yang diambil adalah 10% dari jumlah populasi. Jadi besarnya sampel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah $10\% \times 597 = 59,7$ orang, dibulatkan menjadi 60 orang.

D. Variabel

Darcy dalam Indrajit (2002) menjabarkan definisi operasional tiap-tiap indikator dari variabel efektivitas sebagai berikut:

1. *Political Environment*, yaitu keadaan atau suasana politik di mana proyek yang bersangkutan berada dan dilaksanakan.
2. *Leadership*, yaitu tanggung jawab dari manajer program untuk melaksanakan sebuah program dari awal sampai akhir sesuai dengan siklus proyek (*project life cycle*) yang dijalankan.
3. *Planning*, yaitu tahap yang memberikan gambaran menyeluruh dan detil tentang rencana keberadaan inisiatif *e-Government* diproyeksikan.
4. *Stakeholders*, yaitu berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap penyelenggaraan proyek *e-Government* yang terkait.
5. *Transparency/Visibility*, yaitu selalu tersedianya data dan informasi mengenai seluk beluk dan status program yang berlangsung sehingga para *stakeholders* mampu mengakses secara bebas program yang beragam tersebut.
6. *Budgets*, yaitu besarnya

anggaran yang disediakan pemerintah dan kalangan lain semacam swasta atau bantuan dari pihak asing untuk mensukseskan program tersebut.

7. *Technology*, yaitu spektrum teknologi informasi yang dipergunakan dalam *e-Government*. *Innovation*, yaitu kreativitas ataupun ide-ide yang harus dimiliki dan dimunculkan seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut dalam melakukan pengelolaan terhadap program *e-Government*.

Pengukuran pada instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert dipilih karena mempermudah peneliti untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2004).

E. Pengujian Instrumen

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu instrumen penelitian sebagai alat ukur dalam mendapatkan data yang sesuai dengan korelasi masing – masing pernyataan dengan skor total. Teknik yang digunakan untuk menguji reabilitas instrumen adalah menggunakan rumus *Alpha*. Rumus *Alpha* digunakan karena untuk mencari reabilitas instrumen yang skornya merupakan rentangan antara beberapa nilai atau yang berbentuk skala (Arikunto, 2006:196). Penggunaan rumus *Alpha* dilakukan untuk mengukur reabilitas instrumen akan menghasilkan butir pertanyaan atau pernyataan yang reliabel jika memiliki nilai koefisien korelasi lebih besar atau sama dengan r tabel.

F. Metode Analisis Data

Sugiyono (2004) menyatakan bahwa analisis kuantitatif digunakan apabila data yang diperoleh berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan dalam berbagai kategori. Analisis kuantitatif disebut juga analisis statistik, yang mana penggunaan model ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu pengolahan data, pengorganisasian, dan data penemuan hasil.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas penerapan *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya ini diukur melalui teori pengukuran efektivitas penerapan *e-Government* yang disampaikan Darcy dalam Indrajit (2002). Pengukuran efektivitas penerapan *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan cara menggunakan pengolahan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner.

1. Indikator *Political Environment*

Political Environment yang dimaksud disini adalah keadaan atau suasana politik di mana program *Government Resources Management System* berada dan dilaksanakan. *Political Environment* menekankan pada kampanye/sosialisasi terhadap masyarakat, meletakkan proyek ini sebagai salah satu prioritas tertinggi, peran sponsor internal, produk dan jasa yang dihasilkan harus jelas dan adanya manfaat yang didapat pengguna dari program *Government Resources Management System* ini. Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata setiap pernyataan diperoleh angka dari masing-masing pernyataan yakni, pernyataan kuesioner nomor satu

yang bernilai 3,67 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E), pernyataan kuesioner nomor dua yang bernilai 4,30 berada pada interval 4,21–5 yang artinya Sangat Efektif (SE), pernyataan kuesioner nomor tiga yang bernilai 3,87 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E), pernyataan kuesioner nomor empat yang bernilai 4,28 berada pada interval 4,21–5 yang artinya Sangat Efektif (SE), dan pernyataan kuesioner nomor lima yang bernilai 3,90 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E).

Berdasarkan perhitungan rata-rata indikator *Political Environment*, hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator *Political Environment* adalah 4,00 yang masuk dalam interval 3,41 – 4,2 yang mempunyai arti efektif. Artinya *Political Environment* penerapan program *Government Resources Management System* sudah baik. Dari perhitungan rata-rata nilai kuesioner diketahui bahwa rata-rata nilai yang terendah adalah pada pernyataan nomor satu yaitu sosialisasi dengan hasil nilai 3,67. Sementara itu, pernyataan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu pernyataan nomor dua yaitu prioritas penerapan program *Government Resources Management System* dengan hasil nilai 4,30. Hal tersebut didukung dengan fakta yang ada bahwa dari keinginan pihak Pemerintah Kota Surabaya untuk terus mengembangkan program *Government Resources Management System* dan juga dukungan yang diberikan oleh Walikota dengan mengeluarkan

Peraturan Walikota sehingga program *Government Resources Management System* ini semakin berkembang ke arah yang lebih baik dan memberi dampak kondusif bagi kehidupan pemerintah.

2. Indikator *Leadership*

Leadership adalah tanggung jawab dari manajer program untuk melaksanakan sebuah program dari awal sampai akhir sesuai dengan siklus proyek (*project life cycle*) yang dijalankan. Indikator *Leadership* memiliki ruang lingkup kemampuan seorang manajer dalam mengelola berbagai pengaruh tekanan politik, kemampuan seorang manajer dalam mengalokasikan bermacam-macam sumber daya yang dibutuhkan dan dialokasikan dan kemampuan seorang manajer mengelola sejumlah pengaruh *stakeholder*.

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai kuesioner yang termasuk dalam indikator *Leadership* diperoleh rata-rata yaitu pernyataan kuesioner nomor enam bernilai 3,27 berada pada interval 2,61–3,4 yang artinya Cukup Efektif (CE), kuesioner nomor tujuh diperoleh nilai 3,82 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E), dan kuesioner nomor delapan diperoleh diperoleh nilai 3,82 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E).

Berdasarkan perhitungan rata-rata indikator *Leadership*, hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator ini adalah 3,63 yang masuk dalam interval 3,41–4,2 yang mempunyai arti efektif. Artinya indikator *Leadership*

penerapan program *Government Resources Management System* sudah efektif. Dari perhitungan rata-rata nilai kuesioner diketahui bahwa rata-rata nilai yang terendah adalah pada pernyataan nomor enam yaitu pengaruh iklim politik dengan hasil nilai 3,27. Hal tersebut karena fakta dan peraturan yang tidak memperbolehkan orang yang berada dalam pemerintahan mencampuri urusan politik sehingga para responden tidak mau tahu dan tidak menganggap bahwa iklim politik mempengaruhi penerapan program *Government Resources Management System*. Salah seorang responden yang diwawancarai merasa tidak harus mengikuti tentang kehidupan politik dan dia hanya memikirkan tugasnya untuk menerapkan program *Government Resources Management System* sesuai perintah sebaik mungkin. Sementara itu, pernyataan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu pernyataan nomor tujuh dan delapan yaitu alokasi sumber daya dan pengaruh *stakeholder* yang mendapatkan nilai 3,82 dan masuk dalam kriteria efektif.

3. Indikator *Planning*

Indikator *Planning* yaitu gambaran menyeluruh dan mendetil tentang rencana keberadaan *Government Resources Management System* ini. Indikator *Planning* penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya meliputi kerjasama lintas sektoral dalam perencanaan program *Government Resources*

Management System dan kontribusi perencanaan program *Government Resources Management System* terhadap penyelenggaraan dan penerapan program tersebut. Dari perhitungan nilai rata-rata kuesioner diperoleh hasil yaitu kuesioner nomor sembilan diperoleh nilai 3,97 yang berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E) dan kuesioner nomor 10 diperoleh nilai 3,85 yang berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E).

Berdasarkan hasil penghitungan rata-rata indikator *Planning* penerapan program *Government Resources Management System* di kantor Pemerintah Kota Surabaya mendapat nilai 3,91 yang masuk dalam kriteria efektif. Jadi bisa diartikan bahwa perencanaan program *Government Resources Management System* ini sudah efektif dan berimbang positif pada pelaksanaan dan penerapan program ini secara keseluruhan karena apa yang dilaksanakan sebenarnya adalah hasil dari pengejawantahan dari rencana yang telah disepakati bersama (*baseline planning*). Dari hasil perhitungan nilai rata-rata kuesioner diketahui pernyataan kuesioner nomor sembilan tentang kerjasama lintas sektoral yang mendapat nilai 3,97 lebih tinggi daripada pernyataan kuesioner nomor 10.

4. Indikator *Stakeholder*

Indikator *Stakeholder* penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya meliputi peran *stakeholder* dalam

pelaksanaan program *Government Resources Management System*. *Stakeholder* dalam konteks ini adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggaraan program *Government Resources Management System*. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata kuesioner diperoleh hasil yaitu kuesioner nomor 11 yang mendapat nilai 4,18 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E).

Pernyataan kuesioner nomor 11 yaitu tentang peran *stakeholder* dalam pencapaian target program *Government Resources Management System*. Dari hasil perhitungan nilai rata-rata kuesioner pernyataan nomor 11 mendapat hasil 4,18 yang masuk dalam kriteria efektif. Artinya *stakeholder* berperan efektif dalam pencapaian target program *Government Resources Management System*. Memaksimalkan peran *stakeholder* dalam hal ini adalah tugas pemimpin program dalam memahami kepentingan masing-masing *stakeholder* dan mencoba menyatukannya agar seluruh perbedaan yang ada tidak mengganggu pencapaian visi dan misi program *Government Resources Management System* ini. Salah seorang pegawai yang diwawancarai menyatakan bahwa *stakeholder* yang berada di kantor Pemerintah Kota Surabaya berperan positif dalam penerapan program dan mendukung pencapaian target program *Government Resources Management System*.

5. Indikator *Transparency/Visibility*

Indikator

Transparency/Visibility penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya meliputi pemenuhan keterbukaan informasi/data dan akses dalam pemenuhan informasi melalui media internet. Dari hasil perhitungan rata-rata kuesioner diperoleh hasil yaitu pernyataan kuesioner nomor 12 diperoleh nilai 3,98 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya masuk dalam kriteria Efektif (E) dan kuesioner nomor 13 diperoleh nilai 3,88 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya masuk dalam kriteria Efektif (E).

Berdasarkan perhitungan rata-rata indikator *Transparency/Visibility*, hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator ini adalah 3,93 yang masuk dalam interval 3,41–4,2 yang mempunyai arti efektif. Hasil ini berarti *Transparency/Visibility* dalam penerapan program *Government Resources Management System* sudah efektif. Dari hasil perhitungan kuesioner diketahui bahwa nilai pada pernyataan kuesioner nomor 12 tentang pemenuhan keterbukaan informasi/data *Government Resources Management System* memperoleh nilai 3,98 yang lebih tinggi daripada pernyataan kuesioner nomor 13. Hal ini disebabkan karena kesungguhan pihak Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pemenuhan keterbukaan informasi/data bagi pihak yang berkepentingan sehingga mampu meningkatkan keinginan dan kesadaran para

pihak yang bersangkutan untuk mendukung penerapan program *Government Resources Management System* di kantor Pemerintah Kota Surabaya.

6. Indikator *Budgets*

Indikator *Budgets* penerapan program *Government Resources Management System* di dalamnya meliputi besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program *Government Resources Management System* ini dan bantuan anggaran pihak luar dalam pengembangan program *Government Resources Management System*. Dari perhitungan nilai rata-rata kuesioner diperoleh hasil yaitu pernyataan kuesioner nomor 14 memperoleh nilai 3,87 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E) dan kuesioner nomor 15 memperoleh nilai 3,55 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E).

Berdasarkan perhitungan rata-rata nilai indikator *budgets* penerapan program *Government Resources Management System* di kantor Pemerintah Kota Surabaya diperoleh nilai 3,71 yang masuk dalam interval efektif. Artinya indikator *budgets* dari penerapan program *Government Resources Management System* dikatakan sudah baik. Dari hasil kuesioner diketahui bahwa pernyataan kuesioner nomor 14 dari indikator *budgets* yaitu tentang besarnya anggaran yang disediakan Pemerintah dalam program *Government Resources Management System* ini memperoleh nilai yang tinggi yaitu sebesar 3,87. Hal ini didukung oleh fakta di lapangan bahwa

penerapan program *Government Resources Management System* yang merupakan prioritas utama Pemerintah Kota Surabaya dalam membangun tata pemerintah yang baik (*good governance*) membuat anggaran yang disediakan menjadi lancar karena besarnya anggaran yang disediakan Pemerintah bergantung pada tingkat prioritas dan penggunaannya untuk memecahkan masalah yang sifatnya kritis.

7. Indikator *Technology*

Indikator *Technology* penerapan program *Government Resources Management System* di kantor Pemerintah Kota Surabaya meliputi teknologi yang digunakan, kemudahan penggunaan teknologi dan juga kontribusi teknologi untuk meningkatkan probabilitas berhasilnya suatu program. Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata setiap pernyataan, diperoleh hasil yaitu pernyataan nomor 16 yang bernilai 4,22 berada pada interval 4,21–5 yang artinya Sangat Efektif (SE), pernyataan nomor 17 yang bernilai 4,22 berada pada interval 4,21–5 yang artinya Sangat Efektif (SE) dan pernyataan nomor 18 yang bernilai 4,18 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E).

Berdasarkan perhitungan rata-rata indikator *technology*, hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata indikator *technology* adalah 4,21 yang termasuk dalam interval 4,21–5 yang mempunyai arti sangat efektif. Artinya *technology* dalam penerapan program *Government Resources Management System* di kantor Pemerintah Kota Surabaya sangat baik dilaksanakan. Dari

penghitungan hasil kuesioner diketahui bahwa nilai tertinggi adalah pernyataan kuesioner nomor 16 dan 17 dengan hasil nilai 4,22. Hal ini memang wajar saja terjadi karena pada kenyataannya pihak Pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan tentang teknologi yang digunakan dalam program *Government Resources Management System* ini dan juga kemudahan penggunaan teknologi tersebut. Hal tersebut sangat diperhatikan pihak Pemerintah Kota Surabaya karena tidak semua pegawai bisa mengoperasikan teknologi yang terlalu rumit, maka mereka mengembangkan sebuah teknologi yang mudah namun tetap efektif dalam memberikan hasil.

8. Indikator *Innovation*

Indikator *innovation* yang dimaksud di sini meliputi inovasi dari penyelenggara program dalam mengelola program *Government Resources Management System* ini dan kemampuan pegawai dalam menciptakan ide-ide dan menerapkannya dalam implementasi program *Government Resources Management System* ini. Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner diperoleh nilai dari masing-masing pernyataan yaitu pernyataan kuesioner nomor 19 yang bernilai 4,15 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E) dan pernyataan kuesioner nomor 20 yang bernilai 3,95 berada pada interval 3,41–4,2 yang artinya Efektif (E).

Berdasarkan perhitungan rata-rata indikator *innovation* dalam penerapan program *Government Resources Management System* ini

diperoleh nilai 4,05 yang masuk dalam interval 3,41–4,2 yang mempunyai arti efektif. Maksudnya *innovation* dalam penerapan program *Government Resources Management System* ini sudah baik. Dari hasil perhitungan kuesioner diketahui bahwa pernyataan nomor 19 memiliki nilai lebih tinggi dalam indikator *innovation* ini. Hal tersebut berarti para penyelenggara program *Government Resources Management System* mampu mengeluarkan inovasi yang pada akhirnya berdampak positif bagi keberlangsungan program karena dengan kemampuan untuk melakukan inovasi membuat program ini menjadi tidak memiliki masalah yang cukup berarti karena mampu diselesaikan dengan inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara program *Government Resources Management System* ini.

Efektivitas Penerapan Program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dapat diukur dengan mengetahui dan menentukan indikator-indikator yang menjadi acuan serta yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Darcy dalam Indrajit (2002), terdapat delapan elemen yang menjadi kunci menuju efektivitas dalam penerapan *e-Government*. Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Darcy dalam Indrajit (2002) yaitu tentang pengukuran efektivitas *e-Government* dijadikan acuan untuk mengukur efektivitas penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan secara keseluruhan yang

dilakukan, maka diketahui bahwa nilai rata-rata efektivitas penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya mencapai nilai 3,95. Dengan nilai rata-rata 3,95, jika dimasukkan kedalam kriteria ukuran nilai efektivitas masuk ke dalam interval 3,41–4,2 yang artinya efektif. Dengan mengacu hasil perhitungan nilai rata-rata variabel efektivitas, jika diprosentasekan maka efektivitas penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya mencapai 79%.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya memperoleh nilai rata-rata 3,95 yang menunjukkan hasil yang efektif dengan kriteria interval yang telah ditentukan. Indikator *Technology* adalah indikator yang memperoleh nilai tertinggi dengan nilai rata-rata 4,21 yang masuk dalam kategori sangat efektif, sedangkan yang memperoleh nilai rata-rata terendah adalah indikator *Leadership* dengan nilai rata-rata 3,63 namun masih dalam kategori efektif. Sedangkan enam indikator lainnya memiliki nilai rata-rata di antara 3,91–4,18. Walaupun semua indikator efektivitas penerapan program *Government Resources Management System* dalam kriteria efektif, tidak berarti semua item-item pernyataan dalam kuesioner selalu mendapat jawaban baik atau sangat baik. Item pernyataan nomor satu dan nomor tiga dari indikator *Political*

Environment tentang sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya tentang program *Government Resources Management System* kepada masyarakat dan peran sponsor internal dalam program *Government Resources Management System* memperoleh jawaban sangat tidak baik dari enam responden untuk masing-masing item pernyataan. Berikutnya, item pernyataan nomor 12 dari indikator *Transparency/Visibility* tentang pemenuhan keterbukaan informasi/data dari program *Government Resources Management System* yang juga memperoleh satu jawaban sangat tidak baik. Item kuesioner nomor 15 dari indikator *Budgets* tentang bantuan dana dari pihak luar menjadi item pertanyaan dengan jumlah terbanyak yang dijawab sangat tidak baik yaitu oleh delapan responden, sehingga masih perlunya perbaikan dari penerapan program *Government Resources Management System* yang sudah baik ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan secara keseluruhan yang dilakukan, maka diketahui bahwa nilai rata-rata efektivitas penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya mencapai 3,95. Dengan nilai rata-rata 3,95, jika dimasukkan kedalam kriteria ukuran nilai efektivitas masuk kedalam interval 3,41–4,2 yang artinya efektif. Dengan mengacu hasil perhitungan nilai rata-rata variabel efektivitas, jika diprosentasekan dengan diketahui skor maksimal yang dicapai adalah 5, maka efektivitas penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya mencapai 79%. Dengan demikian efektivitas penerapan program *Government*

Resources Management System dapat disimpulkan berjalan efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sehubungan dengan penilaian efektivitas penerapan program *Government Resources Management System* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya dan mengacu pada kesimpulan perhitungan nilai rata-rata tiap indikator yang sebagian besar termasuk dalam kriteria efektif, maka saran yang dapat diberikan adalah pelaksanaan program *Government Resources Management System* sebaiknya tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar dapat berjalan semakin baik dan optimal dalam pencapaian tujuan program. Peningkatan ini meliputi beberapa bagian seperti:

1. Sosialisasi tentang keinginan Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun *Government Resources Management System* kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan karena masyarakat perlu dilibatkan tentang proyek apa yang sangat diperlukan karena merekalah yang merasakan pembangunan tersebut.
2. Pihak *stakeholder* harus terus mendukung penerapan program *Government Resources Management System* dari dalam supaya lebih efektif lagi penerapannya.
3. Keterbukaan informasi/data tentang seluruh program *Government Resources Management System* kepada masyarakat demi adanya transparansi harus segera dipikirkan secara serius agar

tercipta tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Pemerintah Kota Surabaya juga sebaiknya tidak menutup mata dengan bantuan yang ditawarkan oleh pihak luar, baik itu bantuan materiil maupun imateriil. Bantuan tersebut akan mengirit pengeluaran APBD untuk sektor ini dan tentu saja akan berimbas positif terhadap efektivitas penerapan program *Government Resources Management System*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi
- Sonhaji, Agus Imam. 28 Maret 2009. Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Mewujudkan Good Governance dengan Implementasi e-Procurement dan Pengembangannya (Online)
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Uang Kinerja pada Belanja Langsung.
- Peraturan Walikota Surabaya nomor 50 tahun 2004 jo nomor 30 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (e-Procurement).
- Peraturan Walikota Surabaya nomor 73 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa.
- Peraturan Walikota Surabaya nomor 82 tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- <http://analisadaily.com>, diakses tanggal 26 Desember 2012
- <http://en.wikipedia.org>, diakses tanggal 23 Februari 2013
- <http://lensaindonesia.com>, diakses tanggal 7 Desember 2012, 13 Februari 2013, 27 Februari 2013